

PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI DI WILAYAH KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT

Nur Aditya ; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak e-mail: nuraditya47@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi dengan ingin mengetahui pada pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi di wilayah Kota Pontianak bagi kendaraan dinas pemerintah daerah yang masih dilayani dalam membeli BBM bersubsidi. Perumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi khususnya untuk kendaraan Dinas Pemerintah Daerah di wilayah Kota Pontianak". Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pendistribusian, penyediaan sumber daya, memberikan disposisi dan birokrasi pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU untuk kendaraan dinas pemerintah daerah di wilayah kota Pontianak. Metode penelitian disini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisa datanya penulis menggunakan teknik kualitatif diskriptif dimana data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa Pendistribusian BBM non Subsidi di Kota Pontianak yang dilakukan oleh SPBU terhadap kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal, karena masih saja ditemukan beberapa SPBU yang melayani kendaraan Dinas mengisi premium. Peraturan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dikeluarkan, oleh sebagian pegawai tidak dipatuhi walaupun di kendaraan tersebut bertuliskan sticker larangan menggunakan premium. Pihak SPBU sendiri masih saja melayani kendaraan Dinas tersebut. Oleh karena itu perlu dianalisa secara mendalam tentang bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengkomunikasikan peraturan tersebut sehingga pihak SPBU dan pegawai yang menggunakan kendaraan dinas mematuhi aturan yang telah ditetapkan, pemerintah juga harus menyediakan sumber daya manusia yang ikut membantu lapangan mengawasi pendistribusian BBM non subsidi agar tepat sasaran dan menindak tegas oknum pegawai dan pihak SPBU yang melayani kendaraan Dinas menggunakan premium, pemerintah juga harus memperhatikan disposisi yang dikeluarkan serta memperjelas sistem birokrasi yang dijalankan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Subsidi di Wilayah Kota Pontianak.

Kata Kunci : Pendistribusian, Bahan Bakar Minyak Non Subsidi, Sticker, Disposisi, Sistem Birokrasi

Abstract

The background of this article would like to know the distribution of non-subsidized fuel oil in the city of Pontianak for local government service vehicles are still served in buying subsidized fuel. Formulation of the research problem is "How distribution of non-subsidized fuel for official vehicles in particular local government area of Pontianak city". As for which is the goal of this study was to examine government policy to communicate the distribution, provision of resources, provide disposition and bureaucratic distribution of non-subsidized fuel at filling stations for vehicle local government offices in the city of Pontianak. Research methods here the authors use descriptive research and data collection techniques used in this study is the observation technique, interview, documentation, while the data analysis techniques the author uses descriptive qualitative technique in which data have been collected processed and analyzed qualitatively.

From the analysis of the data showed that distribution of fuel subsidies in non Pontianak by the pump to the vehicle owned by the Government Office of West Kalimantan Province is still not optimal, because it is still only found a few gas stations that serve the Department charge a premium vehicle. West Kalimantan Provincial Government regulations that have been issued, by most employees are not adhered to even in the vehicle sticker bearing the ban on using premium. Parties own retail outlets still serve the Department vehicle. Therefore need to be analyzed in depth about how the government of West Kalimantan Province communicate these rules so that the gas stations and employees who use official vehicles comply with the rules that have been ditetapkan, the government should also provide the human resources field, who helped oversee the distribution of non-subsidized fuel for the right target and crack down on unscrupulous employees and serving the retail outlets using the Office of premium vehicles, the government must also consider the disposition of the issued and clarify the bureaucratic system run. This thesis is intended to provide an overview of West Kalimantan Provincial Government Policies in Distribution of Fuel Subsidies in the Regional Non Pontianak.

Keywords: Distribution, Non Fuel Subsidy, Sticker, Disposition, Openness Bureaucracy

PENDAHULUAN

PT. Pertamina sebagai penyalur atau pendistribusi BBM menyalurkan BBM subsidi maupun non subsidi ke SPBU-SPBU yang ada di kota Pontianak khususnya dan Kal-Bar pada umumnya. BBM tersebut disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas di setiap SPBU. Agar ketersediaan BBM subsidi terkendali, pada tahun 2012 telah ditetapkan peraturan pelarangan BBM bersubsidi.

Peraturan Daerah Kalimantan Barat yang diterbitkan di media massa (koran Pontianak Post) pada hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2012 yang diungkapkan oleh Asisten III pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat Bapak Kartius, SH menyatakan bahwa:

“Pemerintah provinsi Kal-Bar mewajibkan kendaraan Dinas, BUMN dan BUMD untuk menggunakan bahan bakar minyak non subsidi. Langkah ini sebagai upaya pemerintah mengatasi keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk beban BBM. Lebih lanjut Kartius menyatakan bahwa jumlah kendaraan Dinas milik pemerintah Provinsi Kal-Bar sebanyak 534 unit, 1.827 unit kendaraan dinas milik Kabupaten/Kota dan 370 unit kendaraan operasional milik BUMN dan BUMD, dihimbau kepada SKPD, pimpinan BUMN dan BUMD yang belum menyampaikan jumlah nomor tanda kendaraannya, agar menyampaikan kepada Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Kal-Bar dalam rangka penyediaan stikernya.”

Pemberian stiker pada kendaraan Dinas, BUMN dan BUMD diperkuat oleh artikel pada tanggal 14 Oktober 2012 yang diterbitkan pada jam 07.00 WIB oleh RRI Pontianak yang menyatakan:

“Sebanyak 2 ribu 740 kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dan BUMN serta BUMD di Provinsi Kalbar sejak 15 oktober wajib menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Hal itu sesuai dengan surat edaran Gubernur Kalbar tertanggal 3 Oktober 2012, yang sudah diberikan dan disosialisasikan kepada pemerintah daerah serta pimpinan badan usaha milik daerah dan negara di kalbar. Usai *launching* pemakaian dan penggunaan stiker BBM non subsidi di kantor Gubernur Kalbar pagi tadi, asisten tiga sekretariat daerah-setda Kalbar Kartius mengatakan, kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi, bertujuan agar distribusi BBM bersubsidi dapat dirasakan masyarakat yang masih memerlukan.”

Berdasarkan observasi awal di Kota Pontianak sesuai yang berfokus pada bahan bakarnon subsidi khususnya pertamax masih belum optimal dalam pelaksanaan distribusi (penjualan) kepada

masyarakat mampu dan kendaraan dinas (Berdasarkan Permen No. 12 Tahun 2012) dengan indikasi masih ditemukan beberapa kendaraan dinas pemerintah daerah (plat merah) melakukan pengisian BBM subsidi, seperti yang peneliti lihat pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 bahwa kendaraan pemerintah daerah dilayani pengisian BBM subsidi oleh petugas SPBU di Jl. Hasanudin Kelurahan Sungai Jawi Dalam, hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidak menjalankan dan mentaati peraturan yang telah dibuat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, menjadi dasar peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi oleh PT. Pertamina (Persero) di Kota Pontianak. Selain itu juga, ketertarikan peneliti meneliti permasalahan ini adalah belum adanya peraturan yang mengikat atau berupa sanksi yang tegas dari pemerintah daerah dalam pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi. Karena hal ini hanya berupa himbauan moral saja tanpa ada hukuman yang sepatutnya.

KAJIAN TEORI

2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2001: 190) mengemukakan kebijakan publik adalah:

“What government say and do, or not todo. It is the goals or purpose of government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)”

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2003: 9) mengemukakan pengertian implementasi yaitu: “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”. Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2001: 192) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran.

2.2.4 Model Implementasi Kebijakan (George Edward III)

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011: 96-110). Berikut adalah gambar model implementasi George C Edward III:

Gambar 2
Model Implementasi George C. Edward III



Gambar 2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)
 - b. Anggaran (*Budgetary*)
 - c. Fasilitas (*facility*)
 - d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)
3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable yang satu dengan variable lainnya (Sugiyono 2006:11). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi Non Partisipan

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan menurut Moleong (2007) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik observasi atau pengamatan yang digunakan adalah observasi tidak berperan serta (*observation non participant*). Adapun alat pengumpul data yang digunakan pada teknik observasi partisipan ini adalah pedoman observasi..

2. Daftar *Checklist*

Checklist merupakan suatu daftar atau data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Kegunaan dari metode ini, yaitu sebagai alat dalam mengidentifikasi risiko. Tentunya metode ini sangat membantu si pengguna, jika pengguna lupa akan data yang telah diperoleh dari pengamatan, *checklist* dapat dijadikan sebagai alat pengingat. Proses dari penggunaan metode inipun dikatakan cukup mudah, dengan cara melakukan pencatatan data-data yang akan disimpan pada *checklist*.

3. Wawancara

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara mendalam atau lazimnya dikenal dengan wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari sumber data atau subjek penelitian. Pewawancara berusaha bersikap netral, tidak memihak jawaban sumber data maupun menyangkalnya, sekalipun menampilkan gaya “Tertarik” tetapi tidak mengevaluasi respon yang muncul (Rasyid, 2000: 49-50).

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder dalam penelitian. Sebagai dokumentasi yang dimaksud adalah surat edaran Gubernur provinsi Kalimantan Barat tentang penggunaan sticker BBM non subsidi dan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang data kendaraan dinas dan operasional BUMN/BUMD.

Sumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi, data-data atau keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi tersebut, disini penulis menentukan sumber penelitian dan informan antara lain:

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kal-Bar atau pegawai yang mengetahui pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi.

2. Pegawai Biro Perekonomian dan Pembangunan provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala PT. Pertamina cabang pemasaran Pontianak.
4. Karyawan SPBU Jl. Hasanudin No. 6478118..

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kecamatan Pontianak Barat.

Pembahasan

Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan terlepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan yang akan di jual ke masyarakat. Perusahaan berada dalam persaingan yang semakin tajam, perusahaan harus segera mengadakan penelitian terhadap pasarnya. Penelitian pasar tersebut bertujuan untuk mengetahui kebutuhan serta selera konsumen dan jika mungkin menstimulir permintaan serta menciptakan langganan. Suatu perusahaan dikatakan berhasil di dalam *marketing* apabila perusahaan tersebut dapat memasarkan barang-barangnya secara luas dan merata dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

1. Kebijakan pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU di wilayah Kota Pontianak.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Tranmisi: penyaluran komunikasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat BBM Non Subsidi.
- b. Kejelasan: informasi yang diterima dari pembuat kebijakan kepelaksana kebijakan dan yang menerima kebijakan tersebut sudah sangat jelas. Karena selain penyampain melalui tim juga semua ketentuan untuk pelaksanaan pendistribusian BBM Non Subsidi sesuai dengan surat edaran provinsi Kalimantan Barat mengenai pendistribusian BBM Non Subsidi bahwa setiap kendaraan dinas pemerintah daerah (plat merah) wajib menggunakan BBM Non Subsidi.
- c. Konsisten: Informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksan kebijakan sudah konsisten, karena sejak ditetapkan Perda tersebut, SPBU menjalankan tugasnya sesuai Perda tersebut. Wawancara tersebut kurang sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di SPBU Jl. Hasanudin Kelurahan Sungai Jawi Dalam yang masih menemukan melayani pembelian BBM Subisidi kepada kendaraan dinas pemerintah daerah (plat merah) yang sudah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlunya

pengawasan dan komunikasi yang lebih diketahui oleh petugas SPBU, sehingga pelanggaran tidak terjadi.

2. Kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sumber daya pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU di wilayah Kota Pontianak.

- a. Jumlah dan latar belakang pendidikan Pegawai

Staf dan khususnya petugas lapangan yang ada di dinas Pertambangan dan Energi kurang memadai jumlahnya untuk menjangkau beberapa SPBU yang ada di wilayah Kalimantan Barat sehingga dalam pelaksanaan tugas seperti pendataan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian BBM dibantu oleh pegawai tidak tetap untuk memudahkan dalam menjangkau tiap SPBU yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Selain kuantitas, kualitas atau kemampuan pelaksana kebijakan tidak kalah pentingnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan yang dilihat dari latar belakang pendidikan serta keahlian yang dimiliki pegawai.

- b. Informasi Pelaksanaan Program

Informasi mengenai pelaksanaan pendistribusian BBM Non Subsidi sudah sangat jelas, begitu pula personil-personil yang terlibat didalamnya harus melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan.

- c. Wewenang: Kepentingan yang mempengaruhi dari pelaksanaan Pendistribusian BBM non Subsidi

Wewenang para pelaksana kebijakan pendistribusian BBM Non Subsidi adalah dapat meningkatkan pendapatan retribusi termasuk retribusi BBM, sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat.

- d. Fasilitas: Sarana dan prasarana lain yang mendukung dalam kebijakan

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah didalam pengimplementasian kebijakan pendistribusian BBM Non Subsidi sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pelaksanaan pendistribusian BBM Non Subsidi yang dilakukan oleh implementer karena dengan fasilitas yang mencukupi maka implementer juga dapat bekerja dengan baik.

3. Kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan disposisi pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU di wilayah Kota Pontianak.

- a. Komitmen Aparatur Pelaksana

Aparat pelaksana yang melaksanakan pendistribusian BBM Non Subsidi memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketetapan yang

terdapat pada Perda Kal-Bar tentang penggunaan BBM Non Subsidi.

- b. Pengangkatan Birokrat

Keberhasilan suatu kebijakan program dipengaruhi oleh para personil yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya sebagai pelaksana kebijakan. Pengangkatan PNS untuk pegawai lapangan memang masih sangat kurang menurut informan dari BPH Migas Kota Pontianak. Dengan adanya pegawai di lapangan sangat membantu dalam tugas lapangan, mereka memiliki dedikasi yang tinggi dalam membantu mensukseskan program penjualan BBM non subsidi kepada masyarakat

- c. Insentif

Insentif salah satu teknik untuk memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. Untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan adalah dengan manipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan birokrasi pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU di wilayah Kota Pontianak

- a. Standard Operating Prosedures (SOPs)

- b. Fragmentasi: kerja sama dan koordinasi antar pelaksanaan program BBM non subsidi

Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU di wilayah Kota Pontianak, yaitu pembentukan satgas oleh pemerintah provinsi atau kabupaten seluruh Kalimantan Barat yang kemudian satgas tersebut melakukan komunikasi pendistribusian pada setiap agen untuk dapat mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan, baik BBM dalam keadaan normal ataupun tidak.
2. Kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan sumber daya pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU di wilayah Kota Pontianak, yaitu memfungsikan seluruh karyawan bagian migas yang ada di dinas Pertambangan dan Energi berperan aktif mengawasi pendistribusian BBM Non Subsidi.

3. Pemerintah daerah dalam memberikan disposisi pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi kewenangannya adalah dari BUMN/BUMD, seluruh SKPD Kalimantan Barat, Perusahaan perkebunan, pertanian dan pertambangan harus menggunakan BBM non subsidi dan pada SPBU di wilayah Kota Pontianak, yaitu: dengan mendata nomor polisi kendaraan operasional yang diperbolehkan menggunakan BBM non subsidi.
4. Kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan birokrasi pendistribusian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU di wilayah Kota Pontianak, yaitu pemerintah melalui BPH Migas Pertamina, BU PIUNU, Penyalur, Konsumen melakukan koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum sesuai dengan surat edaran Gubernur tanggal 3 oktober 2012, karena masih ditemukan kendaraan dinas yang tidak mematuhi peraturan tersebut seperti mengisi BBM subsidi di SPBU yang ada di Kota Pontianak.

Daftar Pustaka

- Al-Aslamiyah, 2008. *Strategi Penetapan Harga dan Strategi Promosi*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar. UMB
- Agustino, 2006. *Kebijakan Publik, (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dirgantoro Crown. 2001. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Andi.
- David, Fred. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Indeks.
- Dunn, William N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Indeks.
- Faisal, Sanafiah. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Glueck dan Jauch. 2008. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Indeks.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit dibidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- , 2005. *Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- PearceII, John A dan Jr. Robinson, Richard B. 2007. *Manajemen Strategis: Formulasi,*

- Implementasi, dan Pengendalian, Edisi 10 Buku I*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Philip Kotler, 1997. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak : Kopma STAIN.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Manajemen Strategik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Subana dan Sudrajat. 2005. *Statistik Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi di Lengkapi dengan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, 2008. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryono, Agus, 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*, Jakarta: Indeks.
- Wahyudi, Agustinus Sri, 2006. *Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Widodo, 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Referensi Skripsi
- Bastih, Abdul, 2008, dengan judul skripsi “Keberhasilan Penyaluran Dana Kompensasi Subsidi BBM: Variabel-Variabel Penentu dan Pengaruhnya terhadap Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah.
- Dewita Sari, Yesi, 2005, dengan judul skripsi “Dampak Subsidi Solar Terhadap Kelestarian Sumber Daya Ikan Di Bitung, Sulawesi Utara.
- Fikriah, 2005, dengan judul skripsi “Pengaruh Subsidi BBM Terhadap Permintaan BBM Dalam Negeri.
- Referensi Internet
- Anonim, 2011. *Pendistribusian*. [http://www.bps.go.id / tab_sub / view.php? tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=1) 2. Diakses pada September 2012.
- Rizal, 2011. *Analisis Swot Pengembangan Pariwisata*. [www.google.co.id/analisis-swot-pengembangan pariwisata-html](http://www.google.co.id/analisis-swot-pengembangan-pariwisata-html). Diakses pada September 2012.
- , *manajemen-strategi-blogspot.com*. (diakses pada September 2012).
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2012.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Nur Aditya
NIM / Periode lulus : E01107014
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : ~~nuraditya~~ nuraditya17@yahoo.com / 085245171989

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....Publika.....*) pada Program Studi.....Ilmu Adm. Negara..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Di Wilayah Kota Pontianak Kalimantan Barat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal25.7.2013

Dr. Arifin
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak, FISIP UNTAN
Pada tanggal: 29 Juli 2013

Nur Aditya
(nama terang dan tanda tangan mhs)

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologi)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).